



Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Deny Setiawan*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan,
Indonesia

Diterima Oktober 2014; Disetujui November 2014; Dipublikasikan Desember 2014

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) dengan memberdayakan warganegara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada sekolah dasar perlu dirancang dengan menjabarkan komponen *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions* secara fungsional, sehingga peserta didik sebagai warganegara dapat berpartisipasi secara aktif baik dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam era kehidupan global (*desirable personal qualities*). Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka pembelajaran PKn berbasis karakter perlu diterapkan melalui pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sebagai pembelajaran yang inovatif.

Kata Kunci: Karakter; Pembelajaran; Pendekatan; Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

In the new paradigm of civic education, it purposes in forming civil society by empowering citizens in the democratic government. Therefore, the subject of civic education in the primary school should be significantly designed by describing functionally the components of civic knowledge, civic skills and civic dispositions, so that learners as citizens could be participate actively both in the context of society in national life, as well as in the context society of global life (desirable personal qualities). In achieving these objectives, character based of civic education should be implemented by the active, creative, effective and joyful learning as an innovative learning.

Keywords: Character; Learning; Approach; Civic Education

How to Cite: Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 61-72.

*Corresponding author:
E-mail: geodeny@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (Suyatno, 2009).

Pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) yang sudah dimulai sejak Indonesia merdeka hingga kini belum menunjukkan profil kejatidiran bangsa. Hal itu tecermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih melebar, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan anak bangsa, kekerasan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, kolusi-korupsi-nepotisme yang merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas. Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta sikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni dan beringas seakan tak ada lagi nilai keadaban.

Fenomena ini menggambarkan ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada: (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; (3) bergesernya nilai-moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (4)

memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; dan (5) melemahnya *soul* kebangsaan.

Kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan ini, sudah selayaknya pembangunan karakter bangsa menjadi arus utama dalam pembangunan nasional. Artinya, setiap upaya pembangunan harus selalu dipikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Misi pembangunan nasional yang memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi harus terealisasikan guna mewujudkan visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yakni: terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks.

Pembangunan karakter bangsa memiliki sifat multidimensional, karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses *being*. Pemilikan nilai-nilai karakter di era globalisasi, dipandang mendesak sekaitan dengan paradoks nilai yang kini membawa dilema. Untuk itu proses *having* dalam pembangunan karakter dipandang tidak mencukupi jika tidak dibarengi dengan proses *being*. Proses ini menunjukkan: (1) karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam mempertahankan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang beradab; (3) karakter menunjukkan jati diri bangsa, (4) pembangunan karakter membentuk manusia dan masyarakat Indonesia berakhlak mulia dan

turut membentuk warga negara yang kompeten (*civic competence*).

Untuk itu pembangunan karakter bangsa harus dilakukan melalui pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga; satuan pendidikan; pemerintah; masyarakat termasuk generasi muda, media massa, organisasi kemasyarakatan, politik, dan profesi, lembaga swadaya masyarakat; kelompok strategis seperti elite struktural, elite politik, wartawan, budayawan, agamawan, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Strategi pembangunan karakter ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, enkulturasi dan sosialisasi dengan pendekatan multidisiplin yang tidak lagi menekankan pada indoktrinasi.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti pendidikan yang lain, penulis memberikan tempat untuk pembangunan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik dalam membangun karakter peserta didik. Namun sayang, sebagai akibat dari pengaruh politik pada masa lalu terhadap mata pelajaran PKn, telah menyebabkan mata pelajaran tersebut menghadapi dilema, seperti cenderung kurang menarik, dianggap sepele, membosankan, dan bermacam-macam kesan negatif lainnya. Belum lagi dengan fakta di lapangan yang menunjukkan Pendidikan Kewarganegaraan masih dalam posisi pembelajaran konvensional, yakni: (1) pendekatan *teacher centered*; (2) dominasi ekspositori; (3) tumbuhnya budaya belajar verbalistik; (4) mengajar berdasarkan buku teks; (5) evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah; dan (6) posisi guru yang masih *transfer of knowledge*.

Menghadapi fakta masalah-masalah di atas, maka pendidikan kewarganegaraan di era global perlu melakukan pembenahan diri. Pertama, membangun pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru. Kedua, mengembangkan pembelajaran inovatif, yang salah satunya melalui penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

PEMBAHASAN

Upaya pemberdayaan warga negara adalah upaya pembangunan sumber daya

manusia, sehingga cara yang strategis adalah melalui proses pendidikan. Untuk itulah, paradigma pendidikan yang seharusnya dianut pada era reformasi adalah "pendidikan untuk pemberdayaan." Dalam sistem pendidikan nasional, tanpa mengesampingkan mata pelajaran yang lain, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja harus lebih mampu berfungsi secara efektif dalam pemberdayaan warga negara, sebab objek material mata pelajaran ini terutama adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dari sinilah perlu dirumuskan visi, misi, dan peran Pendidikan Kewarganegaraan baru. Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma lama jelas tidak dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan warga negara, bahkan sebaliknya justru dapat menjadikan warga negara semakin tidak berdaya.

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et.al (1999: 25) mengemukakan, *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh guru, siswa, dan masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, yang hal ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizenship*). Akan tetapi pengertian "warga negara yang baik" itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan

sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa “revolusioner”, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasila, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Agar siswa memiliki kompetensi seperti itu diperlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan, serta watak yang mendukung pengembangan kemampuan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Suryadi dan Somardi (2000: 5) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*, dan (3) *civic disposition*. Inilah pengertian “warga negara yang baik” yang diharapkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan memperhatikan tiga komponen/dimensi di atas yang berorientasi pada sistem kehidupan global maka materi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara, tidak saja fungsional dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam era kehidupan global.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara. Setiap orang perlu memiliki kesempatan untuk mempelajari pemerintahan dan masyarakat madani. Pembekalan materi tersebut akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang hakekat kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berpemerintahan, dan mengapa politik dan

pemerintahan itu diperlukan; tujuan pemerintahan; ciri-ciri penting pemerintahan (terbatas dan tidak terbatas); hakekat dan tujuan konstitusi; dan cara-cara alternatif mengorganisasikan pemerintahan. Pembelajaran materi ini hendaknya meningkatkan pemahaman yang lebih banyak tentang hakekat dan pentingnya masyarakat madani atau jaringan kompleks asosiasi-asosiasi politik, sosial, dan ekonomi yang dibentuk secara bebas dan sukarela. Masyarakat madani bukan hanya mencegah penyelewengan atau pemusatan kekuasaan yang berlebihan oleh pemerintah; organisasi-organisasi masyarakat madani berfungsi sebagai laboratorium publik tempat warga negara belajar demokrasi dengan cara mempraktekkannya secara langsung (Suryadi dan Somardi, 2000).

Sementara keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis meliputi: mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik.

Keterampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Politics* (Branson, dkk., 1999: 4) yang menyatakan: “Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan

kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan.” Dengan kata lain cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara

dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya. Pengembangan keterampilan kewarganegaraan dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan, bisa mengacu pada rincian seperti dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1: Keterampilan Kewarganegaraan

Keterampilan Intelektual	Keterampilan Partisipasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> - Membedakan; - Mengelompokkan/mengklasi-fikasikan; - Menentukan bahwa sesuatu itu asli. 2. Menggambarkan (memberikan uraian/ilustrasi), misalnya tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Proses; - Lembaga; - Fungsi; - Alat; - Tujuan; - Kualitas. 3. Menjelaskan (mengklasifikasi/ menafsirkan), misalnya tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Sebab-sebab terjadinya sesuatu peristiwa; - Makna dan pentingnya peristiwa atau ide; - Alasan bertindak. 4. Menganalisis, misalnya tentang kemampuan menguraikan: <ul style="list-style-type: none"> - Unsur-unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi; - Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi; - Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik. 5. Mengevaluasi pendapat/posisi: menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan dan kelemahan isu/ pendapat; - Menciptakan pendapat baru. 6. Mengambil pendapat/posisi: <ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil seleksi berbagai posisi; - Membuat pilihan baru. 7. Mempertahankan pendapat/ posisi: <ul style="list-style-type: none"> - Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan/diambil/ dibela; - Merespons posisi yang tidak disepakati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berinteraksi (termasuk berkamu-nikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam keterampilan ini, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun; - Menjelaskan artikulasi kepentingan; - Membangun koalisi, negoisasi, kompromi; - Mengelola konflik secara damai; - Mencari konsensus. 2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, yang termasuk keterampilan ini, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik; - Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk keterampilan ini, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan; - Memberikan suara dalam suatu pemilihan; - Membuat petisi; - Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian di hadapan lembaga publik; - Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain; - Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Sumber: Diolah dari *Center for Civic Education*. (1994). *National Standard for Civics and Government*, p.p. 1-5; 127-135.

Sedangkan komponen yang ketiga adalah *civic dispositions*. Disposisi kepribadian warga negara yang mendukung efektivitas politik individu, keberfungsian sistem politik yang sehat, martabat dan harga diri, dan kepentingan umum, diidentifikasi oleh *National Standard for Civics and Government* (CCI, 1994), sebagai berikut:

Menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Disposisi ini meliputi kepatuhan secara suka rela terhadap standar perilaku yang dibebankan sendiri daripada memerlukan pembebanan dari kontrol luar, penerimaan tanggung jawab terhadap akibat-akibat dari perbuatan sendiri dan pemenuhan kewajiban moral dan hukum dari keanggotaan dalam masyarakat demokratis;

Memikul tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri, menopang keluarga, merawat, mengurus, dan mendidik anak sendiri. Termasuk juga ke dalam disposisi ini adalah berwawasan tentang persoalan-persoalan publik, memberikan suara, membayar pajak, memberi pelayanan publik, dan memangku jabatan kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri; hormat

Hormat terhadap harga diri dan martabat kemanusiaan. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pandangan-pandangannya, berperilaku menurut cara yang santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan dengannya;

Berpartisipasi dalam urusan-urusan kemasyarakatan menurut cara yang penuh pemikiran dan efektif. Disposisi ini menghendaki wawasan yang luas sebelum memberikan suara atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam wacana yang santun dan reflektif, dan memangku kepemimpinan jika sesuai. Disposisi ini pun menghendaki penilaian apakah dan kapankah kewajiban seseorang sebagai warga negara menghendaki bahwa keinginan dan kepentingan pribadi dikesampingkan demi kepentingan umum dan penilaian apakah dan kapankah kewajiban-kewajiban seseorang atau prinsip-prinsip konstitusi mewajibkan seseorang untuk menolak harapan-harapan kewarganegaraan tertentu;

Meningkatkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat. Disposisi ini meliputi wawasan dan perhatian terhadap urusan-



Gambar 1. Diagram Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Kewarganegaraan (Sumber: Depdiknas, 2003)

urusan publik, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik dan lembaga publik terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat jika mereka tidak mematuhi. Disposisi ini pun memberi kecenderungan warga negara untuk bekerja melalui cara-cara damai dan berdasar hukum untuk mengubah peraturan hukum yang dianggap tidak bijak atau tidak adil.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa civic dispositions merupakan komponen penting yang berkaitan dengan nilai-nilai (*values*) yang berkontribusi dalam pembentukan karakter warga negara.

Ketiga komponen tersebut di atas (*civic knowledge, civic skills, civic disposition*), lebih lanjut perlu dikembangkan, diklasifikasi guna menghasilkan *a body of civic knowledge* yang dapat memenuhi harapan demokrasi *dan civil society*. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, pada hakekatnya adalah pendidikan demokratis yang di dalamnya mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Pendidikan Kewarganegaraan demokratis sekaligus dapat dirancang sebagai wahana pendidikan karakter, utamanya dalam mengembangkan *civic virtue* (kebijaksanaan warga negara) sebagai inti dari demokrasi.

PKn sebagai pendidikan demokrasi merupakan mata pelajaran yang bersifat multidimensional. Ia merupakan pendidikan nilai moral, pendidikan sosial, dan pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu secara singkat PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral.

Alasannya antara lain sebagai berikut :
(1) Materi PKn adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia; (2) Sasaran belajar akhir PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam

perilaku nyata kehidupan sehari-hari; dan (3) Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual

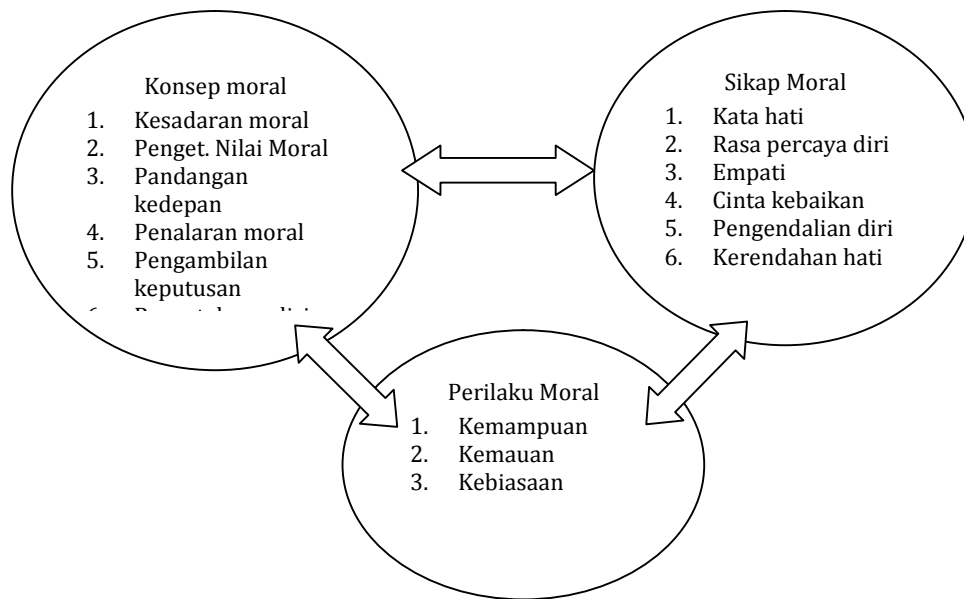
Bila pemikiran Lickona (1992) sebagaimana gambar di atas, kita kaitkan dengan karakteristik PKn, nampaknya kita dapat menggunakan model Lickona itu sebagai kerangka pikir dalam melihat sasaran belajar dan isi PKn. Setiap konsep nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butiran materi PKn pada dasarnya harus memiliki aspek konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku).

Pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam Pkn tersebut, dalam pandangan Lickona (1992) disebut "education for character" atau "pendidikan watak". Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50-51) yakni suatu perpaduan yang harmonis dari berbagai kebajikan yang tertuang dalam keagamaan, sastra, pandangan kaum cerdik-pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman.

Lickona (1992: 51) memandang karakter atau watak memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni moral knowing, moral feeling, and moral behavioral atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Bila pemikiran Lickona (1992) sebagaimana gambar 2, kita kaitkan dengan karakteristik PKn, nampaknya kita dapat menggunakan model Lickona itu sebagai kerangka pikir dalam melihat sasaran belajar dan isi PKn. Setiap konsep nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butiran materi PKn pada dasarnya harus memiliki *aspek konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral*.

Namun sayang, paradigma baru PKn pasca-reformasi belum terimplementasi secara optimal, sekaitan dengan dilemma yang khususnya pada konteks pembelajaran masih berada pada tataran konvensional.



Gambar 2. Diagram konsep nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butiran materi PKN (Sumber: Lickona: 1992)

Untuk itu membangun paradigma baru PKN di tingkat persekolahan perlu dibarengi dengan pembelajaran inovatif, yang salah satu ditawarkan dalam tulisan ini melalui model analisis nilai sebagai satu model yang berada dalam pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Fokus pembelajarannya adalah pada 'mempelajari cara belajar' (*learning how to learn*) dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran.

Sedangkan pendekatan, strategi dan metoda pembelajarannya adalah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses *enquiry & discovery learning*. Dengan pembelajaran konstruktivisme memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Siswa sebagai *stakeholder* terlibat langsung dengan masalah, dan tertantang untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan skenario pembelajaran berbasis masalah ini siswa akan berusaha memberdayakan seluruh potensi akademik dan strategi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah secara individu/kelompok.

Prinsip pembelajaran konstruktivisme yang berorientasi pada masalah dan tantangan akan menghasilkan sikap mental profesional (afektif), berfikir nalar dan kritis (kognitif) dan mau berbuat (psikomotor), sehingga kegiatan pembelajaran selalu menantang dan menyenangkan (Dick dan Reiser, 1989).

Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan paling sedikit empat prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Pertama, proses interaksi (siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multi-media, referensi, lingkungan dsb). Kedua, proses komunikasi (siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa lain melalui cerita, dialog atau melalui simulasi *role-play*). Ketiga, proses refleksi (siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari, dan apa yang mereka telah lakukan). Keempat, proses eksplorasi (siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan dan/atau wawancara).

Pelaksanaan PAKEM harus memperhatikan bakat, minat dan modalitas belajar siswa, dan bukan semata potensi

akademiknya. Untuk itu pelaksanaan PAKEM harus berjalan secara efektif yang memudahkan siswa untuk belajar memanfaatkan sejumlah fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara hidup, atau sesuatu belajar yang diinginkan (Dunne & Wragg, 1996). Paparan di atas, jika diasumsikan bahwa apabila penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dapat berjalan efektif dalam pendidikan kewarganegaraan, maka keterlaksanaan nilai-

nilai pendidikan karakter bangsa dapat turut membentuk desirable personal qualities (warga negara yang dapat diandalkan).

Sekaitan dengan keterhubungan antara pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam PKn dengan pembangunan karakter bangsa, penulis menampilkan deskripsi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa (Depdiknas, 2002) seperti pada tabel 2.

Tabel 2: Deskripsi Nilai-Nilai Pembangunan Karakter Bangsa

No	Nilai Karakter	Indikator
1	Taqwa	1 mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan.
		2 bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah
		3 mengerjakan setiap perintah agama dan menjauhi larangan-Nya.
		4 menyesal setiap membuat kesalahan dan segera mohon ampun kepada Tuhan.
		5 menolak setiap ajakan untuk melakukan perbuatan tercela.
2	Jujur	1 berkata benar (tidak bohong).
		2 berbuat sesuai aturan (tidak curang).
		3 menepati janji yang diucapkan.
		4 bersedia menerima sesuatu atas dasar hak
		5 menolak sesuatu pemberian yang bukan haknya.
		6 berpihak pada kebenaran.
		7 menyampaikan pesan orang lain.
		8 satunya kata dengan perbuatan.
3	Disiplin	1 patuh pada setiap peraturan yang berlaku.
		2 patuh pada etika sosial/masyarakat setempat
		3 menolak setiap ajakan untuk melanggar hukum.
		4 dapat mengendalikan diri terhadap perbuatan tercela.
		5 hemat dalam menggunakan uang dan barang.
		6 menyelesaikan tugas tepat waktu.
		7 meletakkan sesuatu pada tempatnya.
		8 dapat menyimpan rahasia.
4	Demokratis	1 bersedia mendengarkan pendapat orang lain.
		2 menghargai perbedaan pendapat.
		3 tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
		4 toleran dalam bermusyawarah/diskusi.
		5 bersedia melaksanakan setiap hasil keputusan secara bersama.
		6 menghargai kritikan yang dilontarkan orang lain.
		7 membuat keputusan yang adil.
5	Adil	1 memperlakukan orang lain atas dasar kebenaran.
		2 mampu meletakkan sesuatu menurut tempatnya.
		3 tidak ingin lebih atas sesuatu yang bukan haknya.
		4 membela orang lain yang diperlakukan tidak adil.
		5 memperlakukan orang lain sesuai haknya.
		6 tidak membeda-bedakan orang dalam pergaulan.
		7 menghargai kerja orang lain sesuai hasil kerjanya.
6	Bertanggung Jawab	1 menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan sampai tuntas.
		2 tidak mencari-cari kesalahan orang lain.
		3 berani menanggung resiko terhadap perbuatan yang dilakukan.

No	Nilai Karakter	Indikator
		4 bersedia menerima pujian atau celaan terhadap tindakan yang dilakukan.
		5 berbicara dan berbuat secara berterus-terang (tidak seperti ungkapan, lempar batu sembunyi tangan).
		6 melaksanakan setiap keputusan yang sudah diambil dengan tepat dan bertanggung jawab.
7	Cinta tanah air	1 merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia.
		2 bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa.
		3 peduli terhadap rusaknya hutan/lingkungan di tanah air.
		4 bersedia memelihara lingkungan dan melindungi flora dan fauna Indonesia.
		5 dapat menyimpan rahasia negara.
		6 mau hidup dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia.
8	Orientasi pada keunggulan	1 gemar membaca.
		2 belajar dengan bersungguh-sungguh.
		3 mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sebaik mungkin.
		4 berupaya mendapat hasil yang terbaik.
		5 senang dalam kegiatan yang bersifat kompetitif.
		6 tidak cepat menyerah mengerjakan sesuatu yang mengandung tantangan.
		7 memiliki komitmen kuat dalam berkarya.
		8 menjaga din hidup sehat.
		9 gemar membaca dan menulis.
9	Gotong Royong	1 memahami bahwa kerjasama merupakan kekuatan.
		2 memahami hasil kerjasama adalah untuk kebaikan bersama.
		3 dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan bersama. ,
		4 dapat melaksanakan pekerjaan bersama dengan cara yang menyenangkan.
		5 bantu-membantu demi kepentingan umum.
		6 bersedia secara bersama-sama membantu orang lain.
		7 bersedia secara bersama-sama membela kebenaran.
		8 dapat bekerja dengan giat dalam setiap kelompok kerja.
10	Menghargai	1 mengucapkan terima kasih atas pemberian atau bantuan orang lain.
		2 santun dalam setiap kontak sosial.
		3 menghormati pemimpin dan orang tua.
		4 menghormati simbol-simbol negara.
		5 tidak mencela hasil karya orang lain.
		6 memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin.
		7 tidak mengganggu orang yang sedang beribadah menurut agamanya.
		8 menerima orang lain apa adanya.
11	Rela Berkorban	1 mau mendengarkan teman berbicara sampai selesai walaupun ada keperluan lain yang mendesak.
		2 bersedia membantu teman orang lain yang mengalami musibah.
		3 ikhlas bekerja membantu orang lain dan harus meninggalkan pekerjaan sendiri untuk sementara.
		4 bersedia menyumbang untuk kepentingan dana kemanusiaan dalam keuangan pribadi sangat terbatas.
		5 rela memberi fasilitas (kemudahan) kepada orang lain sungguh pun secara din sendiri sangat membutuhkan fasilitas tersebut.
		6 mau memperjuangkan kepentingan orang lain walaupun mengandung resiko untuk diri sendiri.

Sumber: Depdiknas, 2002

Beberapa nilai karakter di atas dalam pembelajaran analisis nilai, dengan langkah-mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan langkah pembelajaran sebagai berikut : dapat diimplementasikan melalui model

Langkah-langkah pembelajaran model analisis nilai:

1. Menginformasikan topik;
2. Menjelaskan langkah kegiatan; Memberi contoh masalah/kasus yang bertentangan dengan topik → mengkaji nilai yang terkait dengan esensi contoh kasus → Menguji komitmen siswa terhadap suatu nilai tertentu → memberikan penguatan terhadap komitmen siswa
3. Meminta siswa mengemukakan contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan sikap sesuai topik berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukannya;
4. Menugaskan siswa menganalisis kasus dengan menunjukkan berbagai nilai yang terkait;

5. Menugaskan agar siswa mendiskusikan nilai yang terkait dengan suatu kasus:
 - a. Mengapa.....?
 - Benarkah demikian?
 - b. Sejauhmana.....?
 - Mengapa demikian?
 - c. Bagaimana
 - d. Apakah akibatnya jika
 - e. Dapatkah
 - f. dan sebagainya.
6. Menugaskan agar merumuskan dan melaporkan hasil diskusi dengan menggunakan format model analisis nilai berikut:

Tabel 3. Format Model Analisis Nilai

Kelompok	Stimulus	Kategori Nilai Karakter	Penalaran Siswa
Nama Kelompok	Gambar peristiwa, Musik, Lagu, Puisi, Drama, Ceritera, Film, Kasus,dll.	Esensi nilai-nilai karakter (Pilih nilai-nilai karakter yang ada pada tabel)	Penalaran terhadap nilai (indikator-indikator yang ada pada tabel)
Contoh: Kelompok I	Contoh: (Lagu D'Masiv yang berjudul "Jangan Menyerah")	Taqwa Rela berkorban	bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah bersedia membantu teman orang lain yang mengalami musibah tanpa pamrih

7. Silang pendapat secara klasikal;
8. Ajukan pertanyaan secara klasikal:
 - a. Dari kategori nilai tadi, posisi nilai mana yang paling dapat diterima secara umum?
 - b. Mengapa demikian?
9. Secara klasikal menugaskan agar peserta didik mengemukakan contoh-contoh akibat tindakan seseorang yang bertentangan dengan nilai esensial.

Langkah-langkah pembelajaran model analisis nilai di atas dapat dirancang pada awal kegiatan pembelajaran dengan memberikan stimulus:

- a. Gambar-gambar yang dapat menarik berkenaan dengan materi pembelajaran
- b. Memanfaatkan musik/lagu yang dapat membangkitkan motivasi bagi peserta didik

- c. Menayangkan film-film yang mengisahkan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan
- d. Memanfaatkan cerita dan puisi yang mengandung nilai-nilai pendidikan
- e. Kasus yang berisi masalah-masalah kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi perlu melakukan pembenahan diri. Pertama, membangun pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru. Kedua, mengembangkan pembelajaran penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Melalui pembelajaran kewarganegaraan berbasis karakter dengan penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, maka sejumlah masalah

pembelajaran PKn yang konvensional dapat bergeser menjadi pembelajaran yang inovatif.

Pembelajaran Konvensional	Pembelajaran Inovatif
Pendekatan <i>Teacher Centered</i>	Pendekatan <i>Student Centered</i>
Dominasi Ekspositori	Multimodel dan media
Minimedia	Multimedia
<i>Textbook Centered</i>	Multi sumber belajar
Pembelajaran Verbalistik	Pembelajaran Konstektual
Evaluasi dominasi kognitif tingkat rendah (C1, C2)	Evaluasi: Kognitif, Afektif dan Psikomotor
Posisi guru; <i>Transfer of knowledge</i>	<i>Director of Learning</i>

Sekolah dasar telah lama dikembangkan pola pembelajaran yang menyenangkan (*Joyful Learning*), tetapi tentunya bukan sekedar menyenangkan tetapi juga harus bermakna. Pembelajaran akan bermakna jika ada *lesson point* yang didapat oleh siswa bahkan juga guru pada tiap kurun pembelajaran. Lesson point akan didapat jika pembelajaran berkesan, berkesan jika melibatkan semua indra dan aktivitas yang menarik seperti yang dicontohkan pada format analisis nilai di atas.

Dengan demikian penerapan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter pada hakikatnya adalah penerapan pembelajaran inovatif. Penerapan aktif, kreatif dan menyenangkan yang dipadu dengan penerapan pembelajaran inovatif dalam pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter diharapkan dapat: (a) pembelajaran lebih efektif dan bermakna; (b) pengalaman belajar bervariasi dengan suasana belajar yang menyenangkan; (c) siswa lebih berpikir kritis (*civic knowledge*); (d) meningkatkan kematangan emosional (*civic disposition*); dan (e) komitmen untuk berbuat atau berpartisipasi (*civis skill*).

DAFTAR PUSTAKA

Branson, M.S., dkk. 1999. Belajar *Civic Education* dari Amerika. Yogyakarta: LKIS.

Center for Civic Education. 1994. *National Standards for Civics and Government*. Calabasas, CA: CCE.

Cogan, J.J. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.

Depdiknas. 2003. *Mata Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Dick, W dan Raiser, R. 1989. *Planning Effective Instruction*. Boston: Allyn & Bacon

Dunne, R & Wragg, T. 1996. *Pembelajaran Efektif (Diterjemahkan oleh Anwar Jasin)*. Jakarta: PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.

Lickona, Thomas. 1992. *Educating For Character*. USA: Bantam Books

Patrick, John J. 1999. "Concepts, at the Core Education for Democratic Citizenship," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick (eds), *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 1-40.

Patrick, J.J. 1999. "Defining, Delivering, and Defending a Common Education for Citizenship in a Democracy," dalam John J. Patrick, Gregory E. Hamot, dan Robert S. Leming (eds), *Civic Learning in Teacher Education. Vol 2*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 5-23.

Print, Murray, et.al. 1999. *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.

PUSKUR. 2010. *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: PUSKUR.

Quiqley, Charles, N. 2000. *Global Trends in Civic Education*. Calabasas: CCE.

Sanusi, A. 1998. *Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*. Bandung: Panitia Semlok PPKn IKIP Bandung.

Somantri, M.N. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.

Suryadi, A. dan Somardi. 2000. *Pemikiran Ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. (Makalah). Bandung: CICED.

Wahab, A. 1999. *Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia Bagi Terbinanya Warga Negara Multidimensional*. (Makalah). Bandung: CICED.